



RENSTRA

2020-2024

**R
E
N
C
A
N
A

S
T
R
A
T
E
G
I
S**



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. SUMATERA SELATAN**



Jln. Ade Irma Nasution No. 8
Palembang - Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan disusun berpedoman pada Renstra Kementerian Agama dan Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024, hasil evaluasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019, serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kementerian Agama. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ke lima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 54 sasaran kegiatan yang selaras dengan sasaran kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra di seluruh satuan kerja di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam periode lima tahun ke depan.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Palembang, 23 September 2020
Kepala

Mukhlisuddin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2202 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2020,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUKHLISUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	4
1.1.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis ...	6
1.1.3 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat Dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	11
1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	14
1.1.5 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	14
1.1.6 Penyuluh Agama yang Kompeten.....	16
1.1.7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	18
1.1.8 Penghulu yang Kompeten	20
1.1.9 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.....	22
1.1.10 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	23
1.1.11 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.....	25
1.1.12 Kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan	25
1.1.13 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	26
1.1.14 Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas	27
1.1.15 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan.....	55
1.2 Potensi dan Permasalahan	57
1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama.....	57
1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	58
1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan.....	59
1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan.....	60
1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan.....	61
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	62
2.1 Sasaran Kegiatan.....	64
2.1.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial.....	64
2.1.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.....	65
2.1.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya.....	68
2.1.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan	69
2.1.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat.....	71
2.1.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas.....	72
2.1.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan	74

2.1.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik	75
2.1.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan	77
2.1.10 Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa	78
2.1.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif	79
2.2 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	83
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	128
3.1 Target Kinerja	128
3.2 Kerangka Pendanaan	164
BAB IV PENUTUP.....	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Penerimaan Penghargaan Kementerian Dalam Negeri atas prestasi zero Conflict di Sumatera Selatan bersama 9 Provinsi lainnya.....	10
Gambar I-2	Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri penandatanganan deklarasi dan penyerahan piagam penghargaan serta ramah tamah tokoh agama Buddha di Griya Agung.	10
Gambar I-3	Dokumen peresmian Klenteng di Komplek JCS Palembang berdampingan dengan lima rumah ibadah lainnya.....	11
Gambar I-4	Jalan Sehat Kerukunan pada HAB Kemenag RI ke-74 dibuka oleh Gubernur Sumsel.....	11
Gambar I-5	Anugerah ZI menuju WBK Tahun 2017-Kankemenag Musi Banyuasin	43

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Potret Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	5
Tabel I-2	Potret Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019.....	5
Tabel I-3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar.....	15
Tabel I-4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	17
Tabel I-5	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk.....	17
Tabel I-6	Prestasi Penyuluh Agama Islam	18
Tabel I-7	Kejuaraan KUA Teladan Nasional	20
Tabel I-8	Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar	20
Tabel I-9	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	21
Tabel I-10	Kejuaraan Penghulu Tingkat Nasional.....	21
Tabel I-11	Data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sumatera Selatan	24
Tabel I-12	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Manajemen Perubahan Tahun 2017	29
Tabel I-13	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Manajemen Perubahan.....	29
Tabel I-14	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Tatalaksana Tahun 2017	30
Tabel I-15	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Tatalaksana Tahun 2018 dan 2019.....	31
Tabel I-16	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Sistem Manajemen Tahun 2017	33
Tabel I-17	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Sistem Manajemen	34
Tabel I-18	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017	35
Tabel I-19	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja..	35
Tabel I-20	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Pengawasan Tahun 2017	36
Tabel I-21	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Pengawasan Tahun 2018 dan 2019.....	37
Tabel I-22	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Kualitas Layanan Publik Tahun 2017.....	38
Tabel I-23	Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Kualitas Layanan Publik	39
Tabel I-24	Hasil Penilaian Zona Integritas dari Tahun 2015 s. d. 2019	45
Tabel I-25	Angka Partisipasi Kasar (APK)	48
Tabel I-26	Angka Partisipasi Murni (APM).....	50
Tabel I-27	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama.....	51
Tabel I-28	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.....	52
Tabel I-29	Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP	53
Tabel I-30	Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PSBB Tahun 2016 s.d 2019.....	54
Tabel I-31	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	55
Tabel I-32	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d 2019	56
Tabel II-1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	83
Tabel III-1	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel III-3	Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program	164

Tabel III-4	Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024.....	167
-------------	---	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik I-1	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2019....	7
Grafik I-2	Data Survey Litbang Tahun 2019	8
Grafik I-3	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Haji Tahun 2019.....	22
Grafik I-4	Penilaian Layanan pada PTSP Kanwil Kementerian Agama.....	40
Grafik I-5	Rerata capaian Area Perubahan Zona Integritas	40
Grafik I-6	Penilaian Zona Integritas dari Tahun 2015 s.d 2019.....	45
Grafik I-7	Penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan	45

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	<i>ASEAN Youth Interfaith Camp</i>
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DIY	D.I. Yogyakarta
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	<i>Inter Religion Council</i>
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	<i>Madrasah Young Researchers Super Camp</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara

PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencama Strategis
SAPA	Sarapan BersamaPenyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis.

Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut,

maka terlihat bahwa pada periode Renstra tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu : **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun 7 (tujuh) misi yang mendukungnya, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting. Untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap Negara dan Pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, meski kalau dilihat dari capaian target sudah sangat baik (di atas 95%) namun persentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih sangat rendah, yakni masih di angka 33,30%. Sementara persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 24,79%. Persentase yang masih sangat rendah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki. Rasio penyuluh dibandingkan jumlah umat beragama di Sumatera Selatan adalah ; Islam 1 : 4.563, Kristen 1 : 1.870, Katolik 1: 1448, Hindu 1 : 293, Buddha 1: 92, Konghucu 1 : 47, sedangkan secara ideal ratio penyuluh dan umat beragama adalah 1:300, sehingga jumlah penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu jika dibandingkan dengan umat beragama masih belum ideal akibatnya banyak masyarakat dan tempat ibadah di Sumatera Selatan yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih ada pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi persentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing pemeluk agama hingga tahun 2019 terlihat pada tabel berikut :

Tabel I-1 Potret Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah penduduk	7.907.662	157.055	91.248	73.479	98.022	64	8.327.530
Jumlah yang aktif pada rumah ibadah	1.500.000	142.000	65.000	60.000	60.000	58	1.827.058
Persentase keaktifan umat	18,97%	90,41%	71,23%	81,66%	61,21%	90,63%	21,94%

Sumber : Laporan Kinerja 2019

Tabel I-2 Potret Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Total
Jumlah rumah ibadah	14.749	621	206	323	172	2	16.073
Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial	1.500	547	150	100	70	2	2.322
Persentase peran rumah ibadah	10,17%	80,52%	72,82%	30,96%	40,70%	100%	14,45%

Sumber : Laporan Kinerja Kanwil Kemenag Sumsel 2019

1.1.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

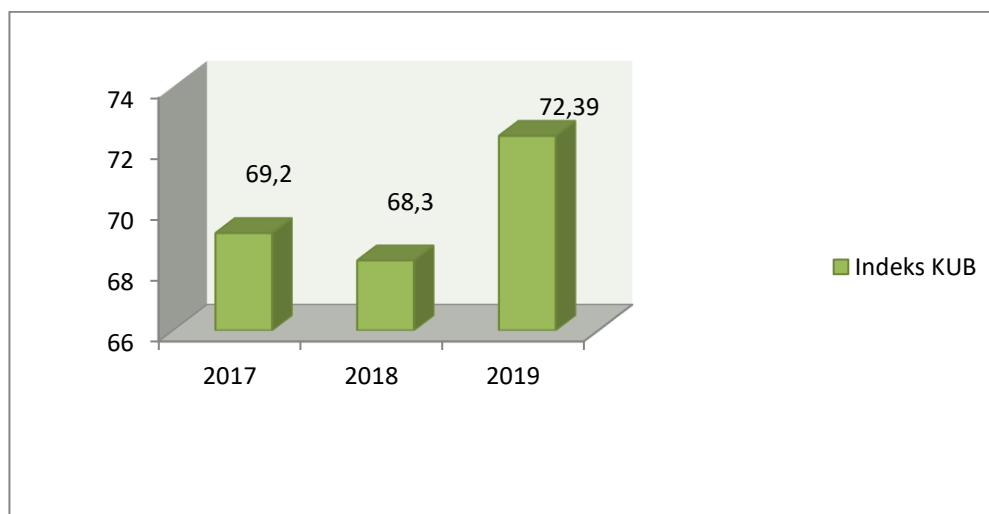
Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Sumatera Selatan serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Sumatera Selatan yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

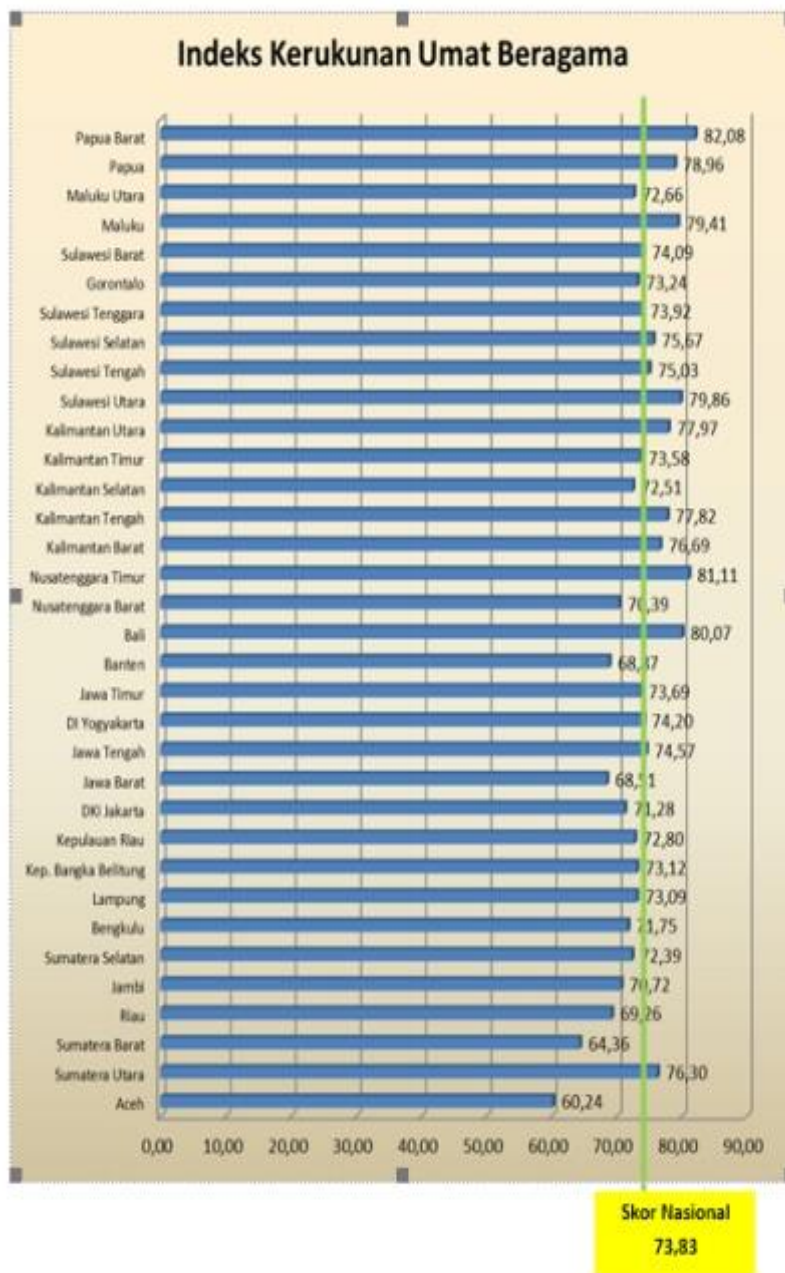
Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) Provinsi; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama.

Indeks KUB adalah survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait peta indeks KUB Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2017-2019 di Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik I-1 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2019



Grafik I-2 Data Survey Litbang Tahun 2019



Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

Capaian indeks KUB cenderung menurun di tahun 2017 sampai tahun 2018 perbandingan di tahun 2017 dengan tahun 2018 turun sebesar 0,9% dan naik menjadi 4,09% pada tahun 2019. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan masih di dalam kategori tinggi mendekati nilai ketetapan Nasional sebesar 73,83. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Periode 2015-2019 Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi dengan zero konflik. Dalam hal ini, zero conflict mengacu pada kondisi damai yaitu belum ditemukan adanya konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) di Sumatera Selatan. Sejauh ini, Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik bernuansa agama. Artinya konflik yang terjadi di masyarakat langsung dapat diselesaikan karena peran FKUB kabupaten/kota sehingga tidak sempat terjadi konflik. Sebagai apresiasi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan *zero conflict* pada tahun 2017.



Sumber : Redaksi Halosumsel-15 Maret 2017

Gambar I-1 Penerimaan Penghargaan Kementerian Dalam Negeri atas prestasi zero Conflict di Sumatera Selatan bersama 9 Provinsi lainnya

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dibentuk 3 Desa Sadar Kerukunan, yakni di tahun 2017 di desa Kabupaten Ogan Ilir; tahun 2018 di desa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan di Desa Kabupaten OKU Timur.

Disamping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dialog Lintas Agama dan Kerjasama Kerukunan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dari tahun 2015 hingga 2019. Kegiatan lainnya yaitu pembuatan video kerukunan umat di chanel Youtube untuk menunjang kerukunan. Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Dialog pemuda mahasiswa lintas agama serta penyelenggaraan Pameran Kerukunan dan Gerak Jalan Kerukunan. Selain itu elemen penyuluh dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilibatkan di setiap kegiatan kerukunan sehingga mampu berkoordinasi dan bekerja sama di masyarakat dalam memberikan pemahaman urgensi kerukunan umat di seluruh kabupaten/kota.



Gambar I-2 Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri penandatanganan deklarasi dan penyerahan piagam penghargaan serta ramah tamah tokoh agama Buddha di Griya Agung.



Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin bersama Gubernur H. Herman Deru di kesempatan tersebut berkenan menandatangani prasasti dan penguntingan pita sebagai tanda peresmian Klenteng Kong Miao yang berlokasi di Kompleks JCS Palembang.

Gambar I-3 Dokumen peresmian Klenteng di Komplek JCS Palembang berdampingan dengan lima rumah ibadah lainnya



Gambar I-4 Jalan Sehat Kerukunan pada HAB Kemenag RI ke-74 dibuka oleh Gubernur Sumsel

1.1.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat Dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat

indikator moderasi, yaitu : komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Sumatera Selatan , adalah fakta masyarakat Sumatera Selatan yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*." Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama Sumatera Selatan .

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 120 orang. Dialog moderasi beragama sebanyak 1 kali dengan peserta berjumlah 40 orang, dialog tokoh agama sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta 160 orang, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Wujud nyata kegiatan tersebut dengan berbagai program berikut :

- a. Kegiatan Workshop Dialog Lintas Agama dan Kerjasama Kerukunan Nasional, regional, dan Internasional dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2017 bertempat di Hotel Duta Palembang, dengan 40 peserta. Dihadiri perwakilan dari MUI, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, FKUB Provinsi, PW NU Sumsel, PW Muhammadiyah Sumsel, Keuskupan Agung Sumsel, PGI Sumsel, PHDI Sumsel, Walubi Sumsel, MBI Sumsel, dan

perwakilan FKUB Kabupaten/Kota se-Sumsel.

- b. Kegiatan workshop Dialog Lintas Agama dan kerjasama Kerukunan Nasional dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 April 2017 di hotel Duta Palembang dengan peserta 40 orang. Dihadiri perwakilan dari MUI, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, FKUB Provinsi, PW NU Sumsel, PW Muhammadiyah Sumsel, Keuskupan Agung Sumsel, PGI Sumsel, PHDI Sumsel, Walubi Sumsel, MBI Sumsel, dan perwakilan FKUB Kabupaten/Kota se-Sumsel.
- c. Kegiatan Workshop Dialog Lintas Agama dan Kerjasama Kerukunan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 November 2018 bertempat di Hotel Duta Palembang, dengan 30 peserta. Dihadiri perwakilan dari MUI, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, FKUB Provinsi, PW NU Sumsel, PW Muhammadiyah Sumsel, Keuskupan Agung Sumsel, PGI Sumsel, PHDI Sumsel, Walubi Sumsel, MBI Sumsel, Konghucu Tridarma, dan perwakilan FKUB Kabupaten/Kota se-Sumsel.
- d. Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Kerukunan Umat Beragama tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2018 bertempat di Hotel Duta Palembang, dengan 30 peserta. Dihadiri oleh perwakilan Kasubbag TU Kemenag Kabupaten/Kota dan perwakilan FKUB Kabupaten/Kota se-Sumsel.
- e. Pembangunan tempat ibadah 5 agama di venue penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 di Sumatera Selatan bagi pengunjung maupun peserta yang bertanding sebagai wujud toleransi.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog

dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Sumatera Selatan ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1). Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2). Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3). Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4). Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5). Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi .

1.1.3 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik.

Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 14.749 masjid/mushola, 621 gereja Kristen/rumah kebaktian, 315 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 232 pura/sanggar, 172 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat), serta 2 kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel I-3 Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	NA	6520	9400	11.363	14.749
Kristen	NA	NA	511	608	621
Katolik	227	245	268	284	315
Hindu	395	295	344	373	378
Buddha	184	184	184	184	184
Konghucu	NA	NA	NA	2	2
TOTAL	227	6765	9911	12.566	15.982

Sumber : Laporan Capaian Kinerja 2015- 2019

Tahun 2015 tidak ada data mengenai capaian indikator tersebut. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 indikatornya berupa rumah ibadah yang mendapatkan bantuan fasilitasi

peningkatan pelayanan. Sementara itu untuk tahun 2018 dan 2019 didasarkan pada pendataan mengenai rumah ibadah yang dinilai memenuhi standar kenyamanan umat yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan.

1.1.4 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir :

Tabel I-4 Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

Agama	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	2459	2459	1590	1600	1.733
Kristen	NA	60	50	NA	80
Katolik	100	100	60	60	63
Hindu	80	20	40	50	251
Buddha	70	70	50	50	101
Khonghucu	NA	NA	NA	NA	2
TOTAL	2709	2649	1740	1760	7292

Sumber : Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

Tabel I-5 Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah penduduk	7.907.662	157.055	91.248	73.479	158.648	64	8.401.062
Jumlah Penyuluh PNS	133	4	1	1	1	-	140
Jumlah Penyuluh Non pns	1.600	80	62	250	100	2	2.094
Jumlah penyuluh	1.733	84	63	251	101	2	2.234
Rasio per agama	1:4.563	1:1.870	1:1448	1: 293	1:1.571	1:32	1:3.755

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata- rata sebanyak 3.755 umat beragama, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Sebagai salah satu bentuk dan bukti peningkatan kompetensi penyuluh agama adalah diakuinya prestasi penyuluh di tingkat nasional, khususnya untuk penyuluh agama Islam.

Tabel I-6 Prestasi Penyuluh Agama Islam

No	Nama	Kualifikasi	Prestasi	Tahun
1	H. Muhammad Kastawi, Lc	PAIF	Juara Harapan 3 Nasional	2019

Sumber : Bidang Penais Zawa 2019

1.1.5 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti :

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;

- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNPB on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada walinikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp.600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;
- j. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Nasional yang dalam kurun waktu 2015-2019 meraih Juara Teladan Nasional. Daftar Peraih Prestasi KUA Teladan dari Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel I-7 Kejuaraan KUA Teladan Nasional

Tahun	Nama	KUA Kecamatan	Prestasi
2018	Drs. H. Tasdiq	Buay Madang Kab. OKU Timur	Harapan II

Sumber : Urais Binsyar 2019

Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I-8 Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar

Jumlah KUA SUMSEL	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
232	113	123	154	195	199

Sumber : Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

1.1.6 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang

andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT.

Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Tabel I-9 Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

Jumlah Penghulu	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
342	60	64	69	324	342

Sumber : Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

Tabel I-10 Kejuaraan Penghulu Tingkat Nasional

Tahun	Nama	KUA Kecamatan	Prestasi
2017	Agus Jaya, Lc	Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir	Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)

Sumber : Bidang Urais Binsyar 2019

1.1.7 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Pelayanan perjalanan jemaah haji di Provinsi Sumatera Selatan melalui Embarkasi Sultan Mahmood Badaruddin II Palembang yang tergabung di dalamnya jemaah haji dari Provinsi Bangka Belitung hingga tahun 2019. Untuk indeks kepuasan dalam pelayanan jemaah haji dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada hingga tahun 2019.



IKJHI Tahun 2019 sebesar 85,91 (Sangat Memuaskan)
tertinggi sejak tahun 2010

Sumber: BPS di https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20191017121602.pdf

Grafik I-3 Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Haji Tahun 2019

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam ibadah haji.

Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, dilakukan dengan menciptakan program unggulan “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan Se-SUMSEL , dengan adanya program ini maka kebutuhan calon jemaah haji dengan waktu keberangkatan yang masih lama ingin mendapatkan bimbingan ibadah dapat mengikuti kegiatan tersebut ditempat yang terjangkau,

tidak dipungut biaya dan waktu yang tidak terbatas, selain dengan bimbingan ibadah haji secara tatap muka juga ditambah dengan adanya buku panduan bimbingan ibadah dan materi bimbingan ibadah yang disebarluaskan secara *online* dalam bentuk *softcopy*.

1.1.8 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan lembaga keagamaan di Sumatera Selatan telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Sumatera Selatan yang berjumlah 8,3 juta. Berikut data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan ternyata cukup besar sebagaimana tabel berikut :

Tabel I-11 Data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sumatera Selatan

No	Nama	Jumlah UPZ	Jumlah Perolehan	Ket.
1	BAZNAS Kabupaten/Kota	17 UPZ	Rp. 5.700.000.000,-	

Sumber : Baznas 2019

Berikut pemberdayaan Tanah Wakaf yang ada di Sumatera Selatan berjumlah 4.693 lokasi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harta Benda Wakaf berupa Tanah Sudah Bersertifikat : 2.547 lokasi;
- b. Harta Benda Wakaf berupa Tanah belum Bersertifikat : 2.146 lokasi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : Workshop Gerakan Sadar Zakat, Workshop Pembinaan Lembaga UPZ, cetak buku peraturan zakat, bantuan pemberdayaan zakat, bantuan untuk Bazanas dan UPZ dan literasi Baznas.

Selain itu untuk peningkatan wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : Bantuan pemberdayaan wakaf produktif, Bantuan operasional penyuluhan wakaf bagi ormas, bantuan pembinaan nazhir dan lembaga wakaf, bantuan operasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Selatan, Cetak buku panduan dan form wakaf, Sosialisasi Pengelolaan Wakaf, Workshop Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif, Rapat koordinasi dengan BWI Sumsel, dan pengadaan perangkat pengolah data komunikasi sabagai sarana pendukung.

Selain itu, Bidang Penerangan Islam, Zakat dan Wakaf juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an. Sementara pada agama lain di Provinsi Sumatera Selatan belum ada lembaga khusus dalam pemberdayaan ekonomi umat.

1.1.9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya kontribusi terhadap perolehan opini Laporan Keuangan, meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; (2) meningkatnya hasil penilaian Zona Integritas.

1.1.10 Kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini LKKA mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI hingga sampai dengan saat ini mendapatkan opini WTP. Untuk tiga tahun terakhir ini (2016-2019), Kemenag berhasil mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kemenag sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satker Pusat dan Daerah.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian nilai opini Laporan Keuangan yang ditandai dengan perolehan (1) terselesaikannya selisih SAIBA dan SIMAK; (2) Terwujudnya jumlah pagu minus yang tidak melebihi batas toleransi, dan (3) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan pada satuan kerja Kantor Wilayah dan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

tahun 2017 sejumlah 92%, tahun 2018 sejumlah 97% dan pada tahun 2019 sejumlah 99%. Sedangkan pada satuan kerja Madrasah adalah : tahun 2017 sejumlah 91 %, tahun 2018 sejumlah 95% dan Tahun 2019 sejumlah 94%.

Data selengkapnya terkait pencapaian nilai opini Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan sebagaimana terlampir.

1.1.11 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.

Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 berhasil mencapai B/Baik (61,25) dan meningkat di Tahun 2018 memperoleh predikat BB/Sangat Baik (71,33). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada :

1. Perencanaan Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 30 %, untuk tahun 2016 dengan nilai 22,14% menjadi 25,83% di tahun 2018.
 - a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Renstra Kementerian Agama Target dalam rencana aksi baru sebatas target tahunan, dan belum di *breakdown*
2. Pengukuran Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 25 %, untuk tahun 2016 dengan nilai
 - a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya belum dibuat

- b. Pedoman atau SOP terkait pengumpulan data kinerja hanya SOP Penyusunan LKj dan penyampaian LKj;
 - c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment masih di bawah 70%;
 - d. IKU telah dilakukan reviu namun tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan telah direviu.
3. Pelaporan Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 15%, untuk tahun 2016 dengan nilai 9,64 % menjadi 14,69% di tahun 2018.
- a. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja *outcome* atau *output* penting;
 - b. Laporan Kinerja berisi sebatas informasi tentang efisiensi sumber daya yang dilakukan;
 - c. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.
4. Evaluasi Internal, dengan maksimal bobot nilai 10%, untuk tahun 2016 dengan nilai 6,10% menjadi 6,24 % di tahun 2018.
- a. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi, namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya;
 - b. Pemantauan rencana aksi hanya sebatas pada isu utama saja;
 - c. Evaluasi rencana aksi hanya dilakukan secara semester;
 - d. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti melalui forum rapat pimpinan namun baru mencapai 75%;
5. Hasil tindak lanjut evaluasi rencana aksi belum menunjuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dengan maksimal bobot nilai 20%, untuk tahun 2016 dengan nilai 6,50% menjadi 12% di tahun 2018.

1.1.12 Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas

Pelaksanaan Zona Integritas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sejak tahun 2015, dimulai dari sosialisasi Zona Integritas oleh tim Zona

Integritas Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan hanya melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas Kementerian Agama Pusat, namun, pada tahun 2017 penilaian mandiri terhadap Pelaksanaan Zona Integritas di beberapa satuan kerja Kementerian Agama mulai diimplementasikan. Pelaksanaan Zona Integritas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 6 (enam) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 melalui Aplikasi e-pokjab Kementerian Agama, yaitu : di tahun 2017 meraih nilai 83,72, di tahun 2018 dengan nilai 88,13 dan di tahun 2019 meningkat di angka 88,88.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Zona Integritas yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Zona Integritas dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian Zona Integritas tidak hanya sekedar formalitas “*evidence based*” melainkan “*impact based*”.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 6 (enam) area perubahan Zona Integritas yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 7 (tujuh) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata kelola pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan .

1. Manajemen Perubahan

Di dalam area perubahan Manajemen Perubahan, pada penilaian mandiri Zona Integritas di tahun 2017, terdapat 4 (empat) indikator dalam Manajemen Perubahan yaitu : pembentukan tim Zona Integritas, Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal adalah 4,03. Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan manajemen perubahan di tahun 2017 adalah Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama. Pada tahun 2017, nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Manajemen Perubahan adalah 4,03 dari nilai total maksimal 5.

Tabel I-12 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Manajemen Perubahan Tahun 2017

No	Target Program		2017	
			Nilai maksimal	Nilai capaian
1	Manajemen Perubahan (5%)		5	4,03
	I	Pembentukan Tim Zona Integritas (1)	1	1
	II	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1	1
	III	Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas (2)	2	1,11
	IV	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (1)	1	0,92

Di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan nilai. Indikator dalam area perubahan Manajemen Perubahan dengan total nilai capaian maksimal adalah 3,64 tahun 2018 dan 3,8 di tahun 2019. Hal ini disebabkan belum terinternalisasi dengan baik nilai-nilai perubahan Sehingga nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Manajemen Perubahan di tahun 2018 dan 2019 adalah menurun dari 4,03 pada 2017 menjadi 3,64 dan 3,8 dari nilai total maksimal 5.

Tabel I-13 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Manajemen Perubahan

AREA PERUBAHAN/PROGRAM/KEGIATAN		2018		2019	
		NILAI	%	NILAI	%
1	Manajemen Perubahan (5%)	3,64	72,75	3,8	76,08%
1	1 Tim Zona Integritas (1%)	1	100	1	100

2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1%)	0,83	83,33	1	100
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2%)	0,89	44,33	0,89	44,33
4	Media Komunikasi Zona Integritas (1%)	0,92	91,75	0,92	91,75%

Hal-hal yang masih harus diperhatikan pada area perubahan ini adalah masih kurangnya motivasi tim kelompok kerja Zona Integritas dalam menjalankan ketugasannya dalam tim. Hal tersebut selain dikarenakan ketugasan dalam tim bukan merupakan tugas pokok dan fungsi kedinasannya, perlunya apresiasi khusus terhadap kerja tim kelompok kerja Zona Integritas oleh pimpinan. Dukungan anggaran terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan perlu lebih ditingkatkan.

2. Penataan Tatalaksana

Pada area perubahan Penataan Tatalaksana pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Prosedur Operasional Tetap (SOP), E-Office pada Kementerian Agama dan Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Agama dengan total nilai capaian maksimal adalah 5. Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan Penataan Tatalaksana di tahun 2017 adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan sudah melakukan pemetaan dan dokumentasi yang memadai terhadap SOP, dukungan aplikasi teknologi terhadap kinerja kantor, serta keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2017, nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Penataan Tatalaksana adalah 4,17 dari nilai total maksimal 5.

Tabel I-14 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Tatalaksana Tahun 2017

No	Target Program	2017	
		Nilai	%
2	Penataan Tatalaksana	4,17	83,4
I	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	1,17	78
II	<i>e-Office</i>	1,5	75
III	Keterbukaan Informasi Publik	1,5	100

Di tahun 2018 semua kegiatan sudah berjalan lebih efektif, efisien dan terukur. dengan total capaian maksimal 5. Dokumen SOP dievaluasi, sosialisasi kepatuhan terhadap SOP dan pembuatan aplikasi-aplikasi terhadap kinerja internal pegawai, serta keterbukaan informasi publik telah berjalan dan tersaji melalui website resmi Kementerian Agama dan mendapat penilaian dan penghargaan internal dari Kementerian Agama sebagai PPID terbaik di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 belum dilakukan evaluasi lanjutan yang menyesuaikan dengan peta bisnis Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sehingga nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Penataan Tatalaksana di tahun 2018 adalah 4,34 dan 4 pada 2019 dari nilai total maksimal 5, hal ini menunjukkan nilai sudah baik.

Tabel I-15 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Tatalaksana Tahun 2018 dan 2019

AREA PERUBAHAN/PROGRAM/KEGIATAN		2018		2019	
		NILAI	%	NILAI	%
2	Penataan Tatalaksana (5%)	5	100%	4	80%
1	Prosedur Operasional Tetap (1,5%)	1,01	86,8%	0,67	44,33%
2	e-Office (2%)	1,84	91,75%	1,84	91,75%
3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5%)	1,5	100%	1,5	100%

Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan penguatan tata laksana di tahun 2017 adalah dilaksanakannya kegiatan penyusunan draft Peta Proses Bisnis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan , namun belum melalui koordinasi dan pembahasan lebih lanjut baik di tingkat kantor wilayah sampai dengan kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 69 SOP untuk Kantor Wilayah dan 187 untuk kantor Kementerian Agama serta 36 SOP layanan unggulan, Penyusunan SOP yang ada belum seluruhnya diselaraskan dengan proses bisnis yang baru ditetapkan dan SOP belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, efektivitas birokrasi serta belum dilakukan evaluasi secara berkala. Sistem Informasi digital atau *e-government* sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan. Namun, karena satu dan lain hal, *e-government* belum dapat diintegrasikan baik ditingkat Kantor Wilayah maupun tingkat pusat. Pada tahun 2017, nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Penguatan tata laksana adalah 11,05 dari nilai total maksimal 12.

Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hal ini adalah SOP yang harus dievaluasi dan direvisi menyesuaikan dengan peta bisnis. Selain itu, harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan data dan informasi yang *update* dan terverifikasi sehingga informasi yang disampaikan terpercaya.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen di tahun 2017 mendapatkan capaian nilai 11,75 dari maksimal nilai 15. Indikator dalam area perubahan ini ada 5 yaitu Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, Pola mutasi internal, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, dan Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai. Di tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan fasilitasi dalam area ini dengan melakukan beberapa hal diantaranya adalah penetapan penataan system manajemen sdm sudah cukup baik di Kantor Wilayah dengan penataan analisis jabatan, analisis beban kerja, bazeting, mengakomodir diklat pegawai, pelaksanaan asesmen pegawai, pejabat eselon dan calon kepala madrasah, pengoptimalan fungsi baperjakat dalam pengangkatan kepala madrasah dengan system panel berdasarkan SE Setjen Kementerian Agama RI nomor : SJ/11/2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrasi Pengangkatan Kepala Madrasah Kementerian Agama RI. Selain itu juga update data Simpeg senantiasa dilakukan sehingga informasi terkait kepegawaian bisa dipakai.

Tabel I-16 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Sistem Manajemen Tahun 2017

No	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
3	Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)		15	11,75
	I	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan (2%)	2	1,55
	II	Pola mutasi internal (2%)	2	2
	III	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3%)	3	2,18
	IV	Penetapan kinerja individu (4%)	4	3,01
	V	Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai (3%)	3	2,01
	VI	Sistem Informasi Kepegawaian (1%)	1	1

Pada tahun 2018 penilaian area perubahan Penataan system manajemen SDM mengalami penurunan pencapaian dengan nilai 9,56 dari maksimal 15 dan di tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 12,05. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan masih melakukan hal yang sama yaitu penataan Peta jabatan, analisa jabatan untuk masing-masing pegawai juga sudah dibuat, namun masih sebatas pegawai dengan jabatan fungsional umum saja dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait hal tersebut. Pengusulun formasi CPNS juga dilakukan di tahun 2018. Penetapan pansel untuk pengangkatan kepala madrasah, assessment bagi pegawai, pejabat fungsional, usulan peserta diklat terus dimaksimalkan.

Tabel I-17 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penataan Sistem Manajemen Tahun 2018 dan 2019

No	Target Program	2018		2019	
		Nilai Capaian	%	Nilai Capaian	%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)	9,56	63,7%	12,05	80,32%
I	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan (2%)	1,78	89%	2	100%
II	Pola mutasi internal (2%)	1,78	89%	1,11	55,67%
III	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3%)	1,67	55,5%	2,18	72,5%
IV	Penetapan kinerja individu (4%)	2,67	66,75%	3,09	77,25%
V	Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai (3%)	0,99	33%	3	100%
VI	Sistem Informasi Kepegawaian (1%)	0,67	67%	0,67	67%

Adapun hal yang harus diperhatikan adalah masih perlunya penerapan pola mutasi internal pegawai berbasis anjab, abk, dan kebutuhan pejabat fungsional yang berkompeten melalui kajian assessment pegawai. berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti dan segera diambil Langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang, misalnya : kajian terkait urgensi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2017, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan akuntabilitas kinerja terdapat 2 (dua) indikator yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana anggaran, penetapan kinerja, dan revisi anggaran mendapat nilai maksimal 5. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan bertanggung jawab penuh dari awal proses penyusunan anggaran hingga revisi anggaran. Dan indikator pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan nilai 3,55. Pengelolaan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pelaporan kinerja sudah baik.

Tabel I-18 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

No	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10)		10	8,55
	I	Keterlibatan pimpinan (5)	5	5
	II	Pengelolaan Akuntabilitas kinerja (5)	5	3,55

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Akuntabilitas memiliki indikator yang sama dengan tahun 2017 dengan capaian yang menurun di tahun 2018 menjadi 7,6 dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 8,55. Pada tahun 2018 kurangnya perhatian terhadap Lakip artinya dokumen perencanaan hanya sebagian kecil saja yang berorientasi hasil dan hanya sebagian kecil saja indikator kinerja unit kerja telah SMART sehingga penilaian menurun dari nilai maksimal 10 dari 8,55. Pada tahun 2019 seluruh dokumen Renstra, RKA-K/L, RKT, perkin telah tersedia dokumennya sehingga nilai tercapai menjadi 8,55. Selain itu sebagian besar dokumen capaian kinerja telah SMART.

Tabel I-19 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	Target Program	2018		2019	
		Nilai	%	Nilai	%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10)	7,6	67%	8,55	85,5%

I	Keterlibatan pimpinan (5)	5	100%	5	100%
II	Pengelolaan Akuntabilitas kinerja (5)	2,6	52%	3,55	71%

5. Penguatan pengawasan

Pada tahun 2017, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan Pengawasan terdapat 5 (lima) indikator yaitu Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan Penanganan Benturan Kepentingan. Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan penguatan pengawasan di tahun 2017 meliputi Kementerian Agama SUMSEL telah menetapkan kebijakan secara formal tim penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Namun, disisi lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penangan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Nilai capaian Zona Integritas pada area perubahan Penguatan Pengawasan di tahun 2017 adalah 10,12 dari nilai total maksimal 15.

Tabel I-20 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Pengawasan Tahun 2017

No	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Nilai Capaian
5	Penguatan Pengawasan		15	10,12
	I	Gratifikasi	3	3
	II	Penerapan SPIP	3	2,13
	III	Pengaduan Masyarakat	3	1,38
	IV	Whistle-Blowing System	3	1,5
	V	Penanganan Benturan Kepentingan	3	2,11

Di tahun 2018 dan 2019, penilaian area penguatan pengawasan mengalami penurunan nilai menjadi 6,77 tahun 2018 dan 6,87 di tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak maksimal dalam internalisasi gratifikasi dan sosialisasi SPIP sehingga pencapaian nilai di tahun 2017 dengan nilai 2,13 turun menjadi 0,87. Sementara itu Whistle-Blowing System di tahun 2019 tidak diterapkan dan tidak ada dokumentasi dalam pelaksanaannya.

Tabel I-21 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Pengawasan Tahun 2018 dan 2019

No	Target Program		2018		2019	
			Nilai	%	Nilai	%
6	Penguatan Pengawasan		6,77	45,13%	6,87	45,79
	I	Gratifikasi	1,5	50%	1,5	50%
	II	Penerapan SPIP	0,87	29%	1,38	46%
	III	Pengaduan Masyarakat	1,25	41,75%	1,88	62,75%
	IV	Whistle-Blowing System	1,25	41,5%	0	0%
	V	Penanganan Benturan Kepentingan	1,9	63,4%	2,11	70,2%

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlu kejelasan kewenangan tim terkait prosedur penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), SPIP dan Dumas/WBS. Penguatan tim SPIP perlu lebih ditekankan dan dibina melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dengan Lembaga pembina SPI. Diatas itu semua, perlu komitmen kuat dari pimpinan dalam mengimplementasikan area perubahan penguatan pengawasan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

6. Penguatan Kualitas Layanan Publik

Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2017 meliputi indikator standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kualitas terhadap layanan terdapat sampel standar layanan PPID kepegawaian di website Kemenag Sumsel, survey kepuasan layanan PPID di website dengan nilai tertinggi diantara layanan PPID provinsi lain. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan

keterbukaan informasi public dari Menteri Agama dan diraihnya laporan keuangan tebaik versi dari KPPN Palembang, sehingga nilai capaian adalah 8,06 dari nilai maksimal 10.

Tabel I-22 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Kualitas Layanan Publik Tahun 2017

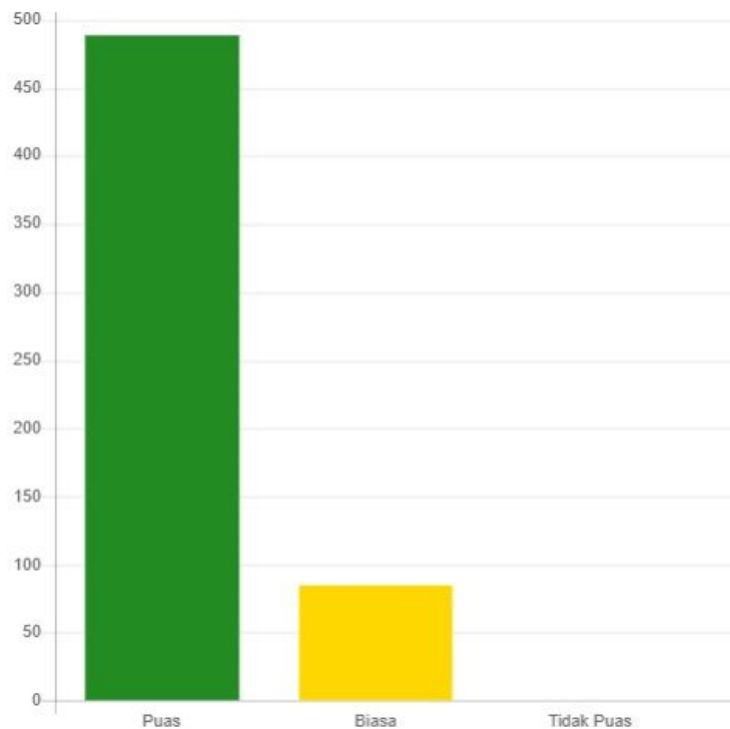
No	Target Program		2017	
			Nilai maksimal	capaian
6	Penguatan Kualitas Layanan Publik (10%)		10	8,06
	I	Standar Pelayanan (3%)	3	1,76
	II	Budaya Pelayanan Prima (3%)	3	2,3
	III	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4%)	4	4

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Pengawasan Hasil evaluasi capaian Zona Integritas pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2018 dan 2019 meliputi penyusunan standar layanan di PTSP sudah dilakukan walaupun belum pernah dilakukan koreksi atau revisi menyesuaikan dengan peta bisnis, budaya pelayanan prima sudah dibangun, sudah dibuat survei terkait kepuasan masyarakat di layanan PTSP. Namun system reward funishment belum dilakukan termasuk tindak lanjut hasil survey masyarakat sehingga mempengaruhi nilai capaian di tahun 2018 menjadi 6,14 dari tahun 2017 sebesar 8,06. Dan di tahun 2019 telah maksimal dilaksanakan peningkatan layanan public dari SOP yang dikoreksi direvisi sesuai peta bisnis, dan pelaksanaan layanan prima, dan tindak lanjut hasil survey kepuasan laynan public. Sehingga hasil nilai pencapaiannya naik lagi menjadi 9,13 atau 91,27%.

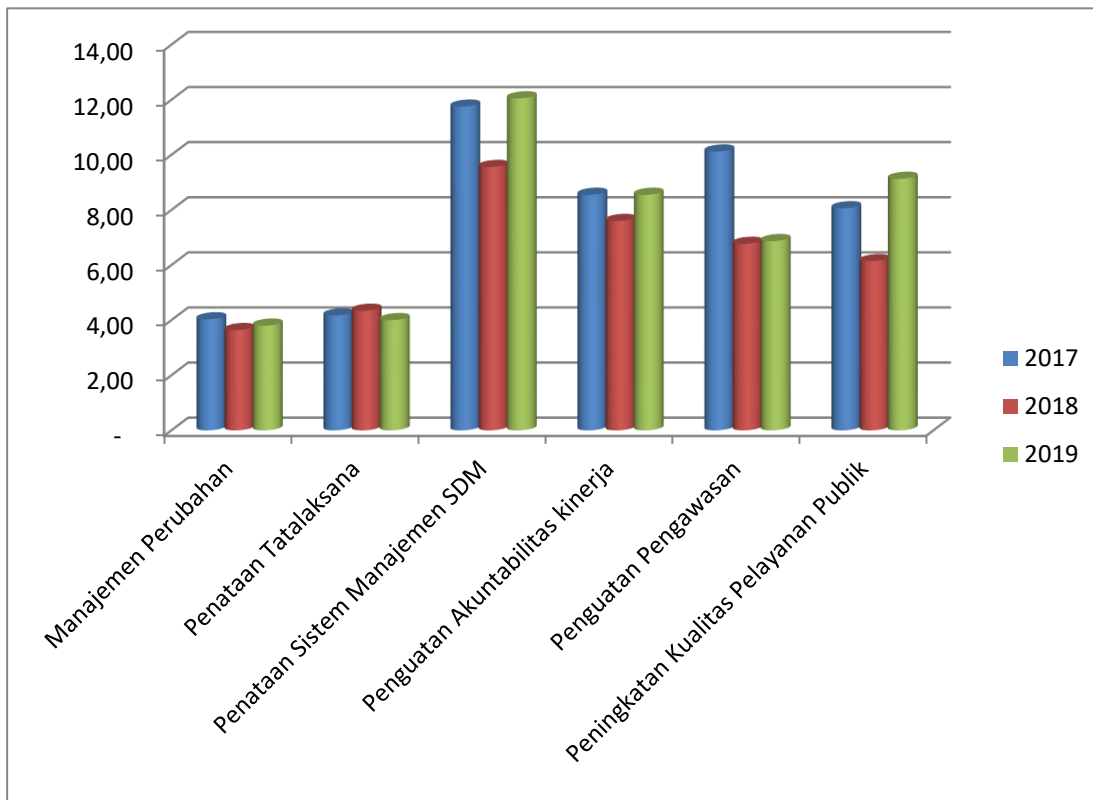
Tabel I-23 Evaluasi Capaian Zona Integritas Pada Area Penguatan Kualitas Layanan Publik Tahun 2017 dan 2018

No	Target Program		2018		2019	
			Nilai	%	Nilai	%
6	Penguatan Kualitas Layanan Publik (10%)		6,14	61,42%	9,13	91,27%
	I	Standar Pelayanan	1,5	50%	2,63	87,5%
	II	Budaya Pelayanan Prima	2,2	73,4%	2,5	83,4%
	III	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	2,44	61%	4	100%

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus di area perubahan ini adalah : sarana dan prasarana pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan belum lengkap, seperti belum adanya ruang konsultasi, ruang bermain anak-anak. Selain itu, kompensasi terhadap pelayanan belum terukur dan didefinisikan secara jelas. Lebih lanjut lagi, pengelolaan pengaduan terhadap layanan belum dituangkan dalam suatu prosedur/juknis yang rinci, dan pelaksanaan reward/funishment yang kongkrit bagi pegawai.

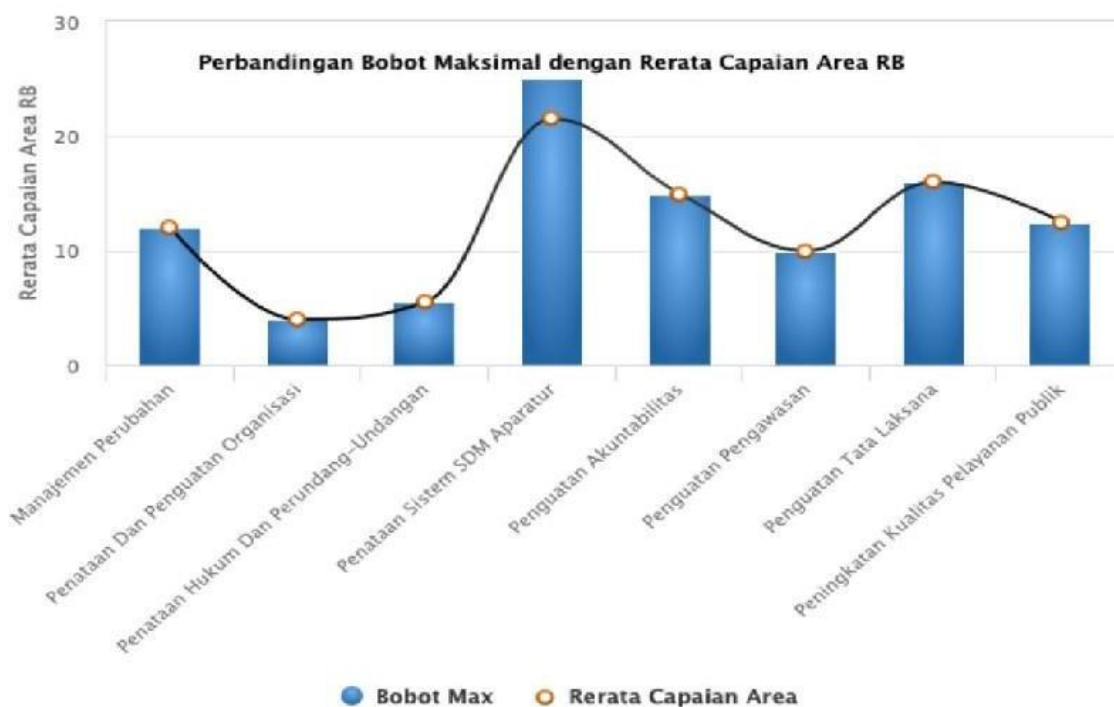


Grafik I-4 Penilaian Layanan pada PTSP Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan Tahun 2019

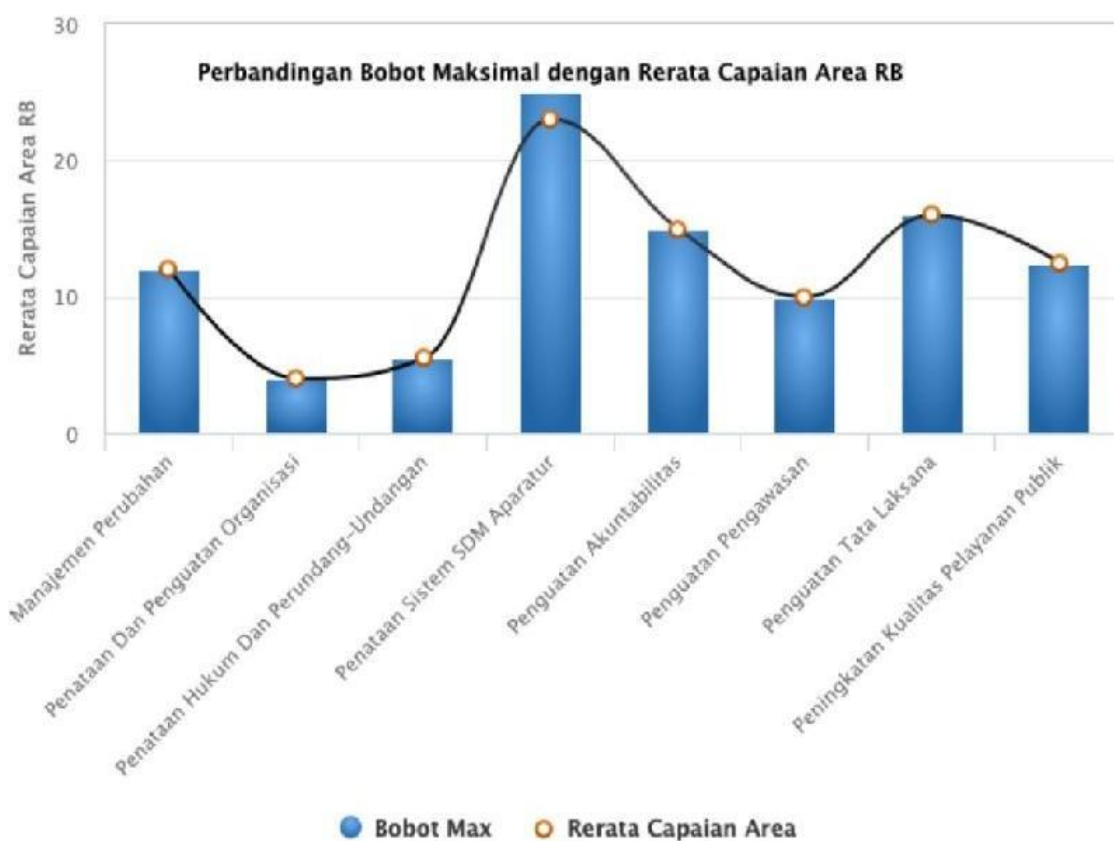


Grafik I-5 Rerata capaian Area Perubahan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2018 dan 2019

Rekapitulasi Rerata Capaian Area Perubahan RB Tahun 2018



Rekapitulasi Rerata Capaian Area Perubahan RB Tahun 2019



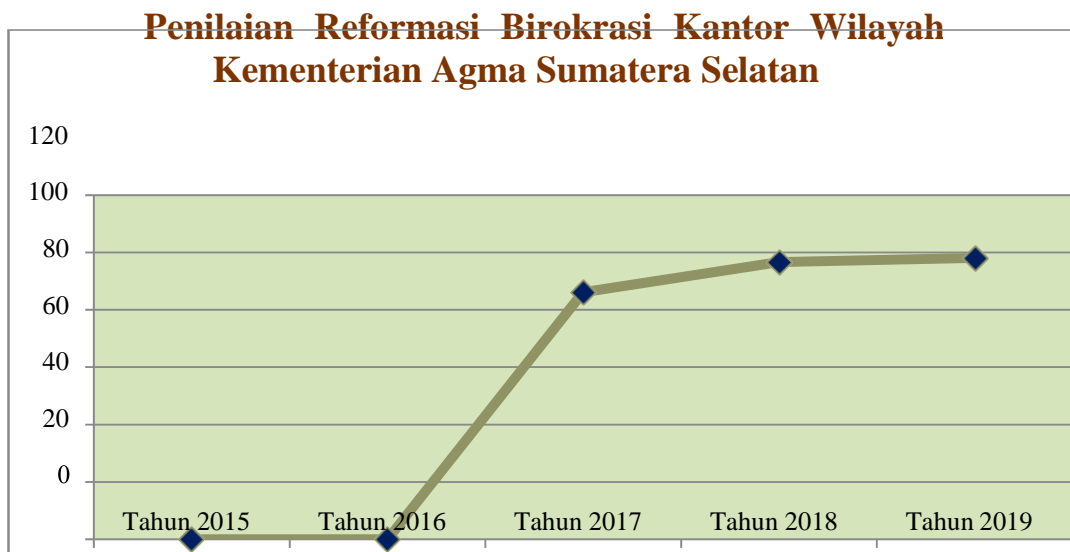


Gambar I-5 Anugerah ZI menuju WBK Tahun 2017-Kankemenag Musi Banyuasin

Berdasarkan **Surat Menteri Agama Nomor: B-53 /MA/OT.00/02/2017** tanggal 9 Februari 2017 perihal Usulan Penetapan Satuan Organisasi/Kerja/UPT Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pada Kementerian Agama, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama mengusulkan agar Satuan Organisasi/Kerja/UPT berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai Organisasi/Kerja/UPT WBK yaitu: 1. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Provinsi Jambi; 2. IAIN Antasari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Kankemenag Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah; 4. Kankemenag Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah; 5. Kankemenag Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel; 6. Kankemenag Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel; 7. Kankemenag Kota Banjarbaru Prov. Kalsel; 8. Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu Timur Prov. Sumsel; 9. Kankemenag Kota Prov. Jambi; 10. Kankemenag Kab. Gunungkidul DI Yogyakarta; 11. Kankemenag Kota Yogyakarta DI Yogyakarta; 12. Kankemenag Kab. Klungkung Prov. Bali; 13. Kankemenag Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur; 14. Kankemenag Kab. Bungo Prov. Jambi;

Atas dasar surat usulan tersebut, Kementerian PAN-RB segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian sehingga menetapkan **Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan Kankemenag Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Pameran Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) yang digelar KPK di Jakarta.



Grafik I-6 Penilaian Zona Integritas dari Tahun 2015 s.d 2019

Grafik I-7 Penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan

Tabel I-24 Hasil Penilaian Zona Integritas dari Tahun 2015 s. d. 2019

Tahun	Hasil Penilaian Zona Integritas
2015	Belum ada penilaian
2016	Belum ada penilaian
2017	79,92
2018	73,29
2019	80,16

1.1.13 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Selatan,

baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain : 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam), jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman di SUMSEL terhadap jumlah penduduk SUMSEL pada usia 6 – 13 tahun.

APK pada jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman di SUMSEL terhadap jumlah penduduk SUMSEL pada usia 12 – 15 tahun.

APK pada jenjang MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman di SUMSEL terhadap jumlah penduduk SUMSEL pada usia 15 – 21 tahun. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel I-25 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
MI/Ula	5,97	12,25	5,99	6,05	6,24	10,76	6,24	13,54
MTs/Wustha	16,74	21,18	16,74	17,43	16,76	11,07	16,76	22,50
MA/Ulya	10,05	9	10,05	9,8	10,05	9,08	10,07	9,41

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

Dari tabel 14 dan grafik yang tergambar, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI/Ula, APK SUMSEL selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Sedangkan pada jenjang MTs, capaian APK pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi target. Hal ini tidak serta merta dimaknai sebagai penurunan minat dan animo masyarakat terhadap MTs maupun partisipasinya dalam program kesetaraan jenjang Wustha. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peserta didik di MTs serta Program Kesetaraan jenjang Wustha pada 5 tahun terakhir. Ketidakberhasilan pencapaian target pada dua tahun terakhir tersebut dapat mengindikasikan bahwa penambahan jumlah peserta didik pada MTs/Wustha belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk pada jenjang usia MTs/Wustha dalam kurun waktu tahun 2018- 2019.

Pada jenjang MA/Ulya, dalam 4 (empat) tahun terakhir capaian APK Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 – 2019 tidak dapat memenuhi angka target dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2019. Pada sisi lain, jumlah siswa MA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa penentuan angka target APK untuk jenjang MA/Ulya cenderung *over estimate*, sehingga dalam 5 tahun terakhir target tidak terpenuhi. Namun demikian, terdapat kecenderungan capaian APK meningkat dari tahun ke tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel I-26 Angka Partisipasi Murni (APM)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
MI/Ula	5,97	5,54	5,83	5,51	6,08	9,68	6,08	9,78
MTs/Wustha	13,21	9	13,21	13,74	13,23	8,46	13,23	8,68
MA/Ulya	6,84	15,64	6,85	8,34	6,68	6,65	6,68	7,21

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

Dari tabel 15 dan grafik yang tergambar, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI/Ula, APM Provinsi Sumatera Selatan selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenjang MTs terdapat fluktuasi capaian APM dalam 5 tahun terakhir, namun secara umum belum dapat memenuhi target. Demikian juga untuk APM jenjang MA. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan *over estimate* dalam menetapkan angka target dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.

Adapun data lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel I-27 Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga pendidikan keagamaan Sumatera Selatan

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Bidang Pendidikan Madrasah	RA	414	18.111
			MI	499	80.884
			MTS	444	75.244
			MA	221	36.140
2	Pendidikan Keagamaan	Bidang Pendidikan Agama dan keagamaan Islam	Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ula	4	1.037
			Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha		
			Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ulya		

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama SUMSEL Tahun 2019

Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Tabel I-28 Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Islam	BOP	RA	NA	NA	NA	NA	19.525
			BOS	MI	71.197	80.541	84996	84355	81.233
			BOS	MTs	59.306	76.562	79464	77396	73.073
			BOS	MA	24.340	35.453	39461	38416	39.287
2	Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ula	NA	457	1465	1265	873
			BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	NA	854	1408	3428	1.510
			BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ulya	NA	750	1209	2606	710

Sumber data : LK Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2019

Kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Provinsi Sumatera Selatan untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

Tabel I-29 Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	9.928	7.739	8.243	10.880	10.880
2	MTs	4.621	6.902	4.860	4.318	4.318
3	MA	3.122	4.388	2.653	3.032	3.032
4	Ula	NA	NA	844	1.265	1.530
5	Wustha	NA	NA	2.673	3.428	3.980
6	Ulya	NA	NA	1.381	2.606	420

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang PAKIS Kantor Wilayah SUMSEL Tahun 2015-2019

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam program tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi program serta penyelenggaraan seleksi bagi calon penerima beasiswa. Data kelulusan seleksi calon peserta PSBB di Sumatera Selatan pada tahun 2016 s. d. 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel I-30 Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PSBB Tahun 2016 s.d 2019

NO	PERGURUAN TINGGI MITRA	2016	2017	2018	2019
1	UNIVERSITAS AIRLANGGA				
	- Pondok Pesantren Muqimus Sunah			1	
	- Pondok Pesantren Raudhatul Ulum			1	
2	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA				
	- Pondok Pesantren Assalam Islami			1	
	- Pondok Pesantren Al Ittifaqiah				1
3	UIN WALISONGO SEMARANG				
	- Pondok Pesantren Qodratullah Langkan	1			
	- Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin		1		
4	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA				
	- Pondok Pesantren Qodratullah Langkan				1
	- Pondok Pesantren Raudhatul Ulum		1		
	- Pondok Pesantren Muqimus Sunah	1			
	- Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin	1			
5	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA				
	- Pondok Pesantren Alharomain			2	
6	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG				
	- Pondok Pesantren Qodratullah Langkan	3	1	3	1
7	UIN GUNUNG DJATI BANDUNG				
	- Pondok Pesantren Qodratullah Langkan	1		1	1
	- Pondok Pesantren Muqimus Sunah		1		
	- Pondok Pesantren Sabilul Hasanah		1		

8	MAHAD ALY KEBON JATI				
	- Pondok Pesantren Sabilul Hasanah				1
9	MAHAD ALY HASYIM ASHARI				
	- Pondok Pesantren Sabilul Hasanah				1
TOTAL		7	5	9	6

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Tahun 2015-2019

Data dalam tabel tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah santri Sumatera Selatan yang lulus dalam program Seleksi Beasiswa Santri Berprestasi. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses bagi santri Sumatera Selatan untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi melalui fasilitasi Kementerian Agama.

1.1.14 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

Tabel I-31 Data Nilai Rata-Rata Hasil UN

Rerata Nilai UN	2015	2016	2017	2018	2019
MTs	68,70	55,13	52,23	48,54	45,05
MA	66,68	49,50	43,49	45,07	47,22

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Tahun 2015-2019

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Penurunan nilai rerata ujian pada siswa madrasah dipengaruhi oleh adanya tingkat kesulitan soal ujian dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Namun mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019 seiring dengan dukungan sarana prasarana madrasah yang semakin meningkat, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru serta semakin bertambahnya usaha peningkatan kompetensi siswa melalui berbagai bentuk kegiatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan .

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Capaian nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 tidak terdapat data yang dapat diakses.

Tabel I-32 Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	85,30	70,50	65,20	55,30
2	2016	79,08	68,00	59,28	58,76
3	2018	81,15	80,65	80,70	79,26
4	2019	70,13	68,46	63,51	56,06

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Th 2015-2019

Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Berikut data terkait jumlah lulusan madrasah yang diterima di perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir :

Tabel I-33 Data Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Sumatera Selatan yang Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi	2017	2018	2019
PTN	381	555	508
PTS	305	355	421

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah Th. 2017-2019

Data tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah lulusan madrasah aliyah yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada masa- masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama :

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Provinsi Sumatera Selatan dan 17 FKUB Kabupaten/Kota;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
- d. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- e. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama

- dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- f. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
 - g. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan Pendidikan di Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah

Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

- a. Sumatera Selatan terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternative;
- e. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;
- f. Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :
 - a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
 - b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
 - c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
 - d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
 - e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

BAB II **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah “**Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong**”. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1 Tujuan

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I Provinsi Sumatera Selatan mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuansebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Programsebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan

indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menkuatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menkuatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase rumah ibadah yang ramah;

- b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;

- j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

2.2.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatas namakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah

produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);

3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan

indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;

- b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- 6. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- 7. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
- 8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina ;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai

berikut :

- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
- b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
- c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.2.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut :

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
 - g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

2.2.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.

2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - c. Persentase siswa madrasah penerima PIP
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan,yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

2.2.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;
 - d. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

2.2.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - c. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
 - d. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status

akreditasi.

2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
- b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
- c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

2.2.10 Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam

pembelajaran

- c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak.
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
 - d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.

4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter*.
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut : Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.

15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

I II-1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	<p>1. Nilai kinerja penyuluh agama</p> <p>2. Persentase penyuluh agama yang dibina</p> <p>3. Jumlah penziar agama yang dibina kompetensi</p> <p>4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</p>	<p>Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama</p> <p>Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%</p> <p>Jumlah penziar agama yang mendapatkan pembinaan kompetensi</p> <p>Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan dalam penyuluhan agama</p>	<p>Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB</p>	<p>Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB</p>	<p>Tahunan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p>

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan Tahunan Tahunan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama,	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	masyarakat yang mendapatkan fasilitasi Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Sekber FKUB dikali 100%	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh	KUB, Penais Zawa	KUB dan Ortala, Penais Zawa	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	agama, tokoh masyarakat dikali 100% Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	KUB, Penais Zawa	KUB dan Ortala, Penais Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang dibina moderasi beragama dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Penais zawa, Semua Bimas	Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah dikali 100% Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100%	Urais, Semua Bimas	Urais, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan			
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Penais zawa, Semua Bimas	Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragamadibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaandikali 100%			
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasahdikali 100%			
		5. Persentase guru pendidikan agama	Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p>	<p>yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas di sekolah keagamaan</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%			
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama			
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan				

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>moderasi beragama</p> <p>11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>			
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</p>	<p>Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren</p> <p>Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran</p>	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			tahun sebelumnya dikali 100%			
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB dan Ortala	Semesteran
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais zawa, semua Bimas	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	<p>Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi</p> <p>Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan pembinaan</p>	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi 	<p>Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan</p> <p>Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan</p> <p>Jumlah lembaga keagamaan yang</p>	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan</p> <p>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</p> <p>6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina</p> <p>7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar</p>	<p>difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan</p> <p>Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan</p> <p>Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</p> <p>Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina</p> <p>Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar</p>			
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Bidang Urais, Penais zawa	Bidang Urais, Penais zawa	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan			Tahunan Bulanan Bulanan Semesteran
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahag	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		ia/sukinah/hitta sukhaya				
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	Bidang Haji	Bidang Haji	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan 	<p>Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah pusat layanan hajidikali 100%</p> <p>Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah hajidikali 100%</p>	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah asrama hajidikali 100% Jumlah pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jamaah hajidikali 100%	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jamaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah jamaah haji dikali 100%	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohatdikali 100%	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil dikali 100% Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat dikali 100%	Bidang Penais zawa	Bidang Penais zawa	Tahunan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf dikali 100% Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf dikali 100% Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf dikali 100%	Bidang Penais zawa	Bidang Penais zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum	1. Persentase madrasah yang menerapkan	Jumlah madrasah yang menerapkan metode	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah,	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	dan pola pembelajaran inovatif	<p>metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan</p> <p>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>	<p>pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan</p> <p>Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>		Pakis, semua Bimas	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai	Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		dasar penetapan tunjangan	tunjangan dibagi jumlah guru di madrasah dikali 100%			
		2. Persentase guru di sekolah keagamaanyang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru di sekolah keagamaanyang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi</p> <p>7. Persentase siswa sekolah keagamaanyang mengikuti asesmen kompetensi</p>	<p>madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaanyang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 4. Persentase mata pelajaran di sekolah 	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan</p>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%			
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<p>1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana</p>	<p>Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha dikali 100%</p> <p>Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya</p>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>prasarana</p> <p>3. Persentase MTs/Wustha/SMPT K/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SM AK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren</p>	<p>Pasramandikali 100% JumlahMTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi JumlahMTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasramandikali 100% Jumlah MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasramandikali 100%</p> <p>Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</p> <p>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</p> <p>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</p>	<p>dan prasarana dibagi Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dikali 100%</p> <p>Jumlah madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dikali 100%</p> <p>Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal dikali 100%</p>			
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah siswa madrasah yang menerima BOS	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS 3. Persentase siswa madrasah penerima PIP 4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima BOS Jumlah siswa madrasah yang menerima PIP dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100% Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP dibagi jumlah siswa sekolah keagamaandikali 100% Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%			
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dibagi	Bidang Dikmad, Pakis,	Bidang Dikmad, Pakis	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	jumlah madrasah dikali 100% Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dibagi jumlah pesantren dikali 100%			
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah kepala madrasah dan pendidikan Jumkahdiniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		4. Persentase ustad pendidikan	Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah yang			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi 	<p>Jumlah guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah guru keseluruhan</p> <p>Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah tenaga kependidikan keseluruhan</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi</p>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	minimal dibagi jumlah guru pendidikan Agama keseluruhan Jumlah tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi jumlah tenaga kependidikan pendidikan agamakeseluruhan			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase guru	Jumlah guru madrasah yang mengikuti PPG dibagi jumlah guru madrasah keseluruhan Jumlah guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG dibagi jumlah guru pendidikan agama Islam keseluruhan Jumlah guru pendidikan	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	agama Islam berkualifikasi minimal S1 dibagi jumlah guru pendidikan agama Islam keseluruhan Jumlah Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2 di bagi jumlah pengawas madrasah keseluruhan			
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang	Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus di bagi jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T keseluruhan Jumlah guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan	Bidang Madrasah, Pakis	Bidang Madrasah, Pakis	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		mendapatkan tunjangan khusus	khusus dibagi jumlah guru pendidikan agama Islam di Madrasah daerah 3 T keseluruhan			
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 	<p>Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi</p>	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya 	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan budaya mutu dibagi jumlah madrasah keseluruhan</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun</p>	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>mutu</p> <p>3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p>	<p>internasional dibagi jumlah siswa madrasah keseluruhan</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan keseluruhan</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan keseluruhan</p>			
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter	Jumlah madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	dan bebas dari kekerasan	<p>dalam</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</p> <p>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;</p> <p>4. Persentase madrasah yang ramah anak.</p> <p>5. Persentase sekolah</p>	<p>jumlah madrasah keseluruhan</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan keseluruhan</p> <p>Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah keseluruhan</p> <p>Jumlah madrasah yang ramah anak dibagi jumlah maddrasah keseluruhan</p> <p>Jumlah sekolah</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		keagamaan yang ramah anak.	keagamaan yang ramah anak dibagi jumlah sekolah keagamaan keseluruhan			
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<p>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</p> <p>2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</p> <p>3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</p> <p>4. Jumlah gugus pramuka pada</p>	<p>Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</p> <p>Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</p> <p>Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</p> <p>Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan</p>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		sekolah keagamaan yang dibina	yang dibina			
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi jumlah rencana produk hukum yang diterbitkan Jumlah kasus hukum yang terselesaikan dibagi jumlah kasus hukum yang diperoleh Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang direncanakan	Subbag KUB	Subbag KUB	Semesteran
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,	1. Persentase dokumen perencanaan ASN	Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<p>yang sesuai kebutuhan satuan kerja</p> <p>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</p> <p>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan</p>	<p>kerja dibagi jumlah dokumen perencanaan ASN keseluruhan</p> <p>Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti dibagi jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang diperoleh</p> <p>Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan dibagi jumlah yang mengikuti</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		jabatan	assesmen keseluruhan			
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibagi jumlah ASN keseluruhan			
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya dibagi jumlah ASN keseluruhan			
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	Jumlah ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu dibagi jumlah ASN yang diusulkan			
		7. Persentase data ASN yang diupdate	Jumlah data ASN yang diupdate dibagi jumlah data ASN keseluruhan			
		8. Persentase layanan administrasi	Jumlah layanan administrasi kepegawaian			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	berbasis digital yang mudah diakses dibagi jumlah layanan administrasi kepegawaian keseluruhan			
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<p>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</p> <p>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</p> <p>3. Persentase realisasi pelaksanaan</p>	<p>Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.</p> <p>Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dibagi jumlah satuan kerja yang belum menerapkan pengendalian intern pelaporan keuangan</p> <p>Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran</p>	Subbag Keuangan dan BMN	Subbag Keuangan dan BMN	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	yang optimal dibagi jumlah anggaran yang diterima Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama di bagi jumlah kerugian negara yang belum diselesaikan			
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i>	Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah barang milik negara yang dimiliki Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah yang belum bersertifikat Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN dibagi	Subbag Keuangan dan BMN	Subbag Keuangan dan BMN	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		(OP)BMN	BMN yang dimiliki			
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<p>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</p> <p>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</p> <p>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis dibagi jumlah satuan organisasi/kerja keseluruhan</p> <p>Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dibagi jumlah laporan kinerja satuan organisasi keseluruhan</p> <p>Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah administrasi keseluruhan</p>	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	<p>Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dibagi jumlah satuan kerja keseluruhan</p> <p>Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 	<p>Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan keseluruhan</p>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra dibagi jumlah renja dan renstra keseluruhan			
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah perencanaan			
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas dibagi jumlah laporan kinerja perencanaan dan anggaran keseluruhan Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional keseluruhan			
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dibagi jumlah prasarana kantor yang ada	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Tahunan
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat	Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi jumlah surat masuk keseluruhan Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi jumlah dokumen keseluruhan Jumlah surat yang	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	diarsipkan dalam e-dokumen dibagi jumlah dokumen yang ada Jumlah menurunnya lelang gagal dibagi jumlah lelang keseluruhan Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding di bagi jumlah sanggah tahun sebelumnya			
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan dibagi jumlah tamu keseluruhan	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Triwulan
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi dibagi jumlah pemberitaan yang	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	keseluruhan Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dibagi jumlah pemberitaan negatif keseluruhan			
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable dibagi jumlah data agama dan pendidikan keseluruhan	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Semesteran
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Pembimas	Pembimas	Triwulan

Sumber : Subbag. Perdatin, 2020

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memiliki strategi melalui 9 (sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
19. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
20. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
22. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
23. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
25. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
26. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
27. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
28. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
29. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus

30. Pelayanan Haji Dalam Negeri
31. Pembinaan Haji
32. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
33. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
34. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
35. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
36. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
37. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
38. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
39. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
40. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
41. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
42. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
43. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
44. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
45. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
46. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
47. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III-1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2024

	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	83,3 80 200 355	91 95 405 545	Nilai % Orang Kelompok	Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	80 310 0	85 310 17	% Orang Desa	KUB dan Ortala

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	0	0	Lembaga/Orang	KUB dan Ortala
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	18	18	Keg	KUB dan Ortala
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB dan Ortala
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	75	100	%	KUB dan Ortala, Penais Zawa
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	85	85	Kegiatan	

6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	86,6	96	%	Penais zawa, Semua Bimas
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	38,75	67	%	Urais, Semua Bimas
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	66,67	73	%	
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	40	70	Orang	
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	34	131	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	12	49	Kegiatan/ Konten	Penais zawa, Semua Bimas

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	N/A	90	%	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	N/A	95	%	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	%	

		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	N/A	90	%	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	85	95	%	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	50	%	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	N/A	66,67	%	
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	80	%	

		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	1773	2098	Kegiatan	
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	3	Kegiatan	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	100 5	100 5	% %	Bidang Pakis
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	6	2	Lokasi	KUB dan Ortala

12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	5	10	Lokasi	Bidang Urais, Penais zawa, semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	20	40	Event	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1 1	1 32	KUA Pengelola	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	251	370	Paket	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	573	1.016	Buah	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	23,33	55,4	%	
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	10	10	Layanan	
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	36	36	Lokasi	
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	40	40	Orang	
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	0	0	Lokasi	

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	4	20	KUA	Bidang Urais, Penais zawa
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	288	85	KUA	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	8.092	8.765	Orang	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	844	4.354	Anak	
		5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	0	0	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	810	518	Keluarga	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	46	100	%	Bidang Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	N/A	100	%	Bidang Haji dan Umroh
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,6	0,3	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	100	%	Bidang Haji dan Umroh
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	%	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Bidang Haji dan Umroh

22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	%	Bidang Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina	20	100	%	Bidang Penais zawa
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	20	100	%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	17	1	%	Bidang Penais zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	10	1	%	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	0	0	%	

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	100	85	%	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	100	85	%	
		3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	28	38	%	
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;	3	8	Madrasah	
		5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	3	8	Madrasah	

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	70	80	%	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	50	60	%	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	70	80	%	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;	3	9	Penghargaan	
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi	NA	15	Kegiatan	
			NA	85	%	

		siswa di madrasah/ sekolah keagamaan 6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan				
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100 19	57,5 35	% %	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	N/A	3	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	N/A	3	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	N/A	3	%	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	30	55	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan	NA	13,67	NA	

		<p>Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</p> <p>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</p> <p>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</p>	45	40	%	
--	--	---	----	----	---	--

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	21.519	26.114	Siswa	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	70	70	Siswa	
		3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22,67	31	%	
		4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	70	70	%	

30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	N/A	N/A	%	Bidang Dikmad, Pakis
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	19.525	21.665	Siswa	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;	2,09	42	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	0,51	11	%	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	N/A	20	%	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	N/A	15	%	
		5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	25	80	%	

33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	77,25	93	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	46,67	87	%	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	2	22	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	30	100	%	
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	100	100	%	
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	25	50	%	

35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	11	23	%	Bidang Madrasah, Pakis
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	13,33	25	%	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	910	1908	Madrasah	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas

37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	60	47,5	%	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	38	73	%	

38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	N/A	85	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	N/A	70	%	
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	42,5	%	

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	1803	2173	Organisasi Ekstrakurikuler	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	1773	2098	Gugus	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	75	100	%	Bag TU
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80	100	%	
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10	2	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	70	80	%	Bag TU

42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	Bag TU
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang abkode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	75	85	%	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	NA	70	%	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	NA	60	%	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	NA	70	%	

		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	N/A	84	%	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	80	95	%	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	70	79	%	

43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	50	90	Dokumen	Bag TU
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	N/A	85	%	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98,1	99	%	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	100	%	

44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	63,44	100	%	Bag TU
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	52	100	%	
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	62	100	%	

45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	70	76	%	Bag TU
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	76	81	%	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	65	70	%	

46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	79	84	%	Bag TU
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	161	161	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3	3	Orang	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	76	81	%	Bag TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	75	80	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	70	%	

48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	75	80	%	Bag TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	76	81	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	N/A	95	%	Bag TU

50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	N/A	95	%	Bag TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	N/A	90	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	N/A	90	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	N/A	0	%	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	5,8	5	%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	NA	98	%	Bag TU

52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	N/A	98	%	Bag TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	N/A	98	%	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	80	%	Bag TU
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4796	4876	orang	Bag TU

Sumber : Subbag. Perdatin, 2020

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel III-1 Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00) Tahun 2020
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,254,552,351
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	46,321,920
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	29,492,993
Pembinaan Administrasi Umum	16,828,927
Program Kerukunan Umat Beragama	1,204,972
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1,204,972
Program Bimbingan Masyarakat Islam	169,509,945
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	34,903,350
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	654,000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00) Tahun 2020
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	14,767,910
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	440,250
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	118,744,435
Program Pendidikan Islam	985,431,972
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	213,215,085
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	8,661,500
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	278,176,351
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	177,551,517
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	307,827,519
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	4,642,975
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	196,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	597,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	620,029
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	3,229,946
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	8,234,279
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	995,670
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	972,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	2,117,108

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00) Tahun 2020
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	4,149,501
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	5,590,162
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	980,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1,290,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	201,784
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	3,118,378
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	5,120,360
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	670,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	1,170,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	3,280,360
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	28,495,766
Pelayanan Haji Dalam Negeri	10,500,696
Pembinaan Haji	3,145,672

Sumber : Subbag Perdatin, 2020

Tabel III-2 Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN		1,024,770,677	1,294,699,561	1,359,434,556	1,427,406,306	5,106,311,100
Program Dukungan Manajemen		774,846,039	813,588,347	854,267,773	896,981,171	3,339,683,330
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		40,880	42,924	45,071	47,325	176,200
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		2,122,378	2,228,497	2,339,922	2,456,919	9,147,716
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		30,065,068	31,568,322	33,146,739	34,804,076	129,584,205
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		71,670	75,254	79,017	82,968	308,909
Pembinaan Administrasi Perencanaan		356,790	374,630	393,362	413,031	1,537,813
Pembinaan Administrasi Umum		18,133,813	19,040,504	19,992,530	20,992,157	78,159,004

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		375,693	394,478	414,202	434,913	1,619,286
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		118,299,451	124,214,424	130,425,146	136,946,404	509,885,425
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		574,191,141	602,900,699	633,045,734	664,698,021	2,474,835,595
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen		595,140	624,897	656,142	688,950	2,565,129
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		3,235,906	3,397,702	3,567,588	3,745,968	13,947,164
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		2,116,725	2,222,562	2,333,691	2,450,376	9,123,354

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		4,062,433	4,265,555	4,478,833	4,702,775	17,509,596
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu		287,000	301,350	316,418	332,239	1,237,007
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu		3,055,378	3,208,147	3,368,555	3,536,983	13,169,063
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha		100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha		2,691,796	2,826,386	2,967,706	3,116,092	11,601,980
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		15,044,777	15,797,016	16,586,867	17,416,211	64,844,871

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama		77,923,313	81,819,482	85,910,461	90,205,989	335,859,245
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		2,413,495	2,534,170	2,660,879	2,793,923	10,402,467
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		31,472,271	33,045,885	34,698,180	36,433,089	135,649,425
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		857,700	900,585	945,615	992,896	3,696,796
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		21,691,000	22,775,550	23,914,328	25,110,045	93,490,923
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		533,500	560,175	588,184	617,594	2,299,453
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		930,000	976,500	1,025,325	1,076,592	4,008,417

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		1,297,425	1,362,297	1,430,412	1,501,933	5,592,067
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		1,826,495	1,917,820	2,013,711	2,114,397	7,872,423
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha		1,311,600	1,377,180	1,446,039	1,518,341	5,653,160
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		132,069	138,673	145,607	152,888	569,237
Pelayanan Haji Dalam Negeri		9,171,537	9,630,114	10,111,620	10,617,201	39,530,472
Pembinaan Haji		5,461,054	5,734,107	6,020,813	6,321,854	23,537,828
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		825,167	866,426	909,748	955,236	3,556,577
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		67,863,068	289,946,562	304,443,893	319,666,094	981,919,617

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		6,577,880	6,906,774	7,252,113	7,614,719	28,351,486
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		58,328,678	61,245,112	64,307,368	67,522,737	251,403,895
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		578,950	607,898	638,293	670,208	2,495,349
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan islam		104,000	109,200	114,660	120,393	448,253
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen		136,000	142,800	149,940	157,437	586,177
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik		915,360	961,128	1,009,185	1,059,645	3,945,318

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu		625,000	656,250	689,063	723,517	2,693,830
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha		597,200	627,060	658,413	691,334	2,574,007
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun		104,138,257	109,345,170	114,812,429	120,553,052	448,848,908
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah		102,941,257	108,088,320	113,492,736	119,167,373	443,689,686
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		675,000	708,750	744,188	781,398	2,909,336
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha		522,000	548,100	575,505	604,281	2,249,886

Sumber : Subbag Perdatin, 2020

BAB IV PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama dan Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan,

Mukhlisuddin